

Diplomasi Arab Saudi melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

Studi Kasus Kontestasi Hegemoni Ideologi *vis-à-vis* Iran Pasca KTT OKI 2016

Lamda Fietry Paradisiaca¹

Tulus Yuniasih²

Syafiuddin Fadlillah³

Abstract

This research aims to describe and analyze the diplomatic efforts carried out by Saudi Arabia through the OIC which is the largest organization after the United Nations. Such efforts were aimed to win the ideological competition between Sunnis and Shiites against Iran. This research based on the realism perspective. The time period of this research is limited between 2016 until 2021, starting after the 13th OIC Summit on April 14th – 15th, 2016. This research is an analytical descriptive research, using the qualitative method. In the analysis, this research uses the concept of diplomacy supported by the theory of balance of power, the concept of hegemony, the concept of ideology, and regionalism concept. The results of this research indicate that in order to win the competition with Iran, in ideological hegemony in the Middle East Region, Saudi Arabia has made diplomatic efforts through the Organization of Islamic Cooperation (OIC). Saudi Arabia conducted hard diplomacy and soft diplomacy. Hard diplomacy was carried out by blocking Iran from several OIC summits, which was intended to threat Iran. The soft diplomacy method was carried out through the official statements from Saudi Arabia, which was intended to influence the OIC's policy direction. These showed the application of a balance of power, which was to balance and inhibit Iran's Shia ideology. In addition, soft diplomacy was also applied through the leadership of Saudi Arabia in the organization which was shown by the domination on the structure of the OIC. In strengthening the efforts to maintain the hegemony of Sunni ideology, Saudi Arabia has also provided financial assistance aimed at helping the OIC and its organs.

Keywords: *diplomacy, ideological hegemony, Organization of Islamic Cooperation (OIC), Iran, Saudi Arabia*

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. Email: 1742500356@student.budiluhur.ac.id

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Al-Azhar Indonesia.

Pendahuluan

Hubungan Arab Saudi dengan Iran dalam beberapa tahun terakhir dapat dideskripsikan dengan persaingan hegemoni (kepentingan politik dan geostrategis, dan ideologi yang menyangkut paham *Sunni* dan *Syiah*). Arab Saudi sendiri dapat disebut sebagai yang sangat berpengaruh di Wilayah Timur Tengah dengan kepemilikan minyak bumi dalam jumlah terbesar di dunia (The World Factbook, 2021). Arab Saudi juga merupakan negara Islam terbesar yang didominasi oleh paham *Sunni*. Islam Sunni merupakan satu-satunya agama yang legal atau diperbolehkan bagi Arab Saudi. Persentase Muslim *Sunni* di Arab Saudi berkisar antara 85% - 90%, sementara penganut paham *Syiah* hanya sekitar 10% - 15% (The World Factbook, 2021). Arab Saudi mendapat tantangan dari Iran. Iran juga merupakan negara yang kuat di Wilayah Timur Tengah. Iran menganggap negaranya merupakan hegemon alami yang dilandaskan atas populasi masyarakatnya yang banyak jika dibandingkan dengan Arab Saudi, lalu memiliki wilayah yang luas dan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan militernya. Pada aspek agama, Iran didominasi oleh penganut kuat Islam *Syiah*. 90% - 95% dari populasi Iran merupakan Muslim *Syiah*, dibandingkan dengan Muslim *Sunni* yang ada di Iran hanya sebanyak 5% - 10% (The World Factbook, 2021).

Hal tersebut menjadikan Arab Saudi sebagai rival Iran selama bertahun-tahun dengan tujuan mendominasi ideologi dan perebutan kekuasaan di Wilayah Timur Tengah. Persaingan ideologis ini berpusat pada klaim yang bersaing atas keaslian dan legitimasi Islam, serta pada konflik yang sudah ada sebelumnya antara Islam *Syiah* Iran dan Islam *Sunni Wahhabi* Arab Saudi, dengan keengganan historisnya untuk menerima Islam *Syiah*. Jika dilihat dari perspektif sejarah, terdapat peristiwa yang menunjukkan awal adanya perebutan kekuasaan dalam hal ideologi antara Arab Saudi dengan Iran yaitu sejak adanya Revolusi Republik Islam Iran pada tahun 1979 (Mackenzie & Boone, 2012: 1). Persaingan antara Arab Saudi dan Iran semakin intensif pada tahun 2016. Arab Saudi melakukan eksekusi mati terhadap Syekh Nimr Al-Nimr pada 2 Januari 2016. Syekh Nimr Al-Nimr adalah seorang ulama *Syiah* terhormat dan juga kharismatik yang di eksekusi mati, karena dianggap melakukan aktivitas terorisme yang dapat mengancam keamanan nasional Arab Saudi (CNN Indonesia, 2016).

Setelah peristiwa tersebut, Organisasi Kerja sama Islam (OKI) menyelenggarakan KTT yang ke-13 di Turki pada 14 - 15 April 2016 (OIC Istanbul Summit, 2016). Salah satu agenda dalam KTT tersebut ditujukan untuk menindaklanjuti serangan massa *Syiah* yang menyerang kedutaan besar Arab Saudi. Sisi lain dari berlangsungnya KTT itu, Arab Saudi menunjukkan jati dirinya yang menjadi negara adidaya dengan mempengaruhi negara anggota-anggota OKI agar mengikuti keinginannya. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa resolusi yang ditunjukkan langsung kepada Iran sebagai salah satu negara anggota. Dalam draft hasil konferensi tersebut, tepatnya pada Poin 30 hingga Poin 34, OKI mengecam sikap Iran atas serangan pada kedutaan besar Arab Saudi di Teheran dan konsulat di Mashad (OIC Istanbul Summit, 2016: 9).

Awal mula terbentuknya OKI saat setelah terjadinya pembakaran yang dilakukan terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada 21 Agustus 1969, raja dan kepala negara dan pemerintah negara-negara Islam memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi Islam Pertama, yang diadakan di Rabat, Maroko, dari 22 - 25 September (Luis, 2014: 4). Pada tanggal 23 - 25 Maret 1970, Raja Faisal dari Arab Saudi mengadakan Konferensi Menteri Luar Negeri Islam Pertama di Jeddah. Forum ini membentuk Organisasi Konferensi Islam, yang landasan dasarnya Konstitusi Organisasi diadopsi di Jeddah pada Maret 1972 oleh KTT Menteri Luar Negeri tersebut di atas dan mulai berlaku pada 28 Februari 1973 (Luis, 2014:4).

Bertahun-tahun kemudian, pada 28 Juni 2011, organisasi tersebut berganti nama dan lambang menjadi Organisasi Kerja Sama Islam (AA, 2011). Hubungan Iran dan Arab Saudi dicirikan oleh pertempuran berkelanjutan untuk kepemimpinan dalam organisasi. Sepanjang tahun 1980-an Iran telah menggunakan OKI terutama sebagai forum di mana untuk menegur sesama anggota dan bukan sebagai tempat dialog. Kemudian, saat berakhirnya Perang Iran-Irak pada tahun 1988 membawa periode perbaruan yang diberikan oleh Iran kepada OKI, di mana Iran mulai bertindak secara lebih konstruktif di dalam organisasi (Wastnidge, 2016:118).

Di dalam OKI, Iran memainkan peran penting dalam menyelenggarakan pertemuan darurat para menteri luar negeri OKI dalam rangka untuk mengatasi krisis di Bosnia-Herzegovina. Namun, selama pertemuan tersebut, persaingan Iran-Saudi muncul lagi dengan inisiatif yang bersaing tentang cara terbaik untuk melanjutkan mendukung Muslim Bosnia dalam perang mereka melawan tentara Yugoslavia dan proksi Bosnia-Serbianya (Wastnidge, 2016:118). Perhatian dan aktivitas baru di OKI ini di pihak Iran, bertepatan dengan era Rafsanjani dari 'perdamaian pragmatis'. Memang mengarah pada upaya pertama untuk pemulihan hubungan tentatif antara Teheran dan Riyadh sebagai periode melihat upaya Iran untuk memperbaiki pagar dan memperkuat kembali hubungannya dengan dunia Arab secara keseluruhan.

Berdasarkan pada data dan fenomena yang telah dijabarkan, tulisan ini membahas diplomasi Arab Saudi dalam mengimbangi pengaruh ideologi Iran di Kawasan Timur Tengah melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pasca KTT OKI Ke-13 tahun 2016. Penelitian ini didasarkan atas banyaknya fenomena yang menunjukkan terjadinya ketegangan yang signifikan pasca keberpihakan OKI kepada Arab Saudi, dalam KTT OKI ke-13 yang dilaksanakan pada April 2016. Kemudian Arab Saudi lebih lanjut menjadikan OKI sebagai media untuk mengimbangi hingga menghambat pengaruh *Syiah* Iran.

Pembahasan

Peristiwa Revolusi Iran membuat ketegangan dan konfrontasi antara kedua negara tersebut semakin terus-menerus berulang. Pergeseran kebijakan luar negeri Iran setelah revolusi adalah hasil dari dominasi ideologi yang menjadikan Iran memilih untuk mengabaikan norma, prinsip, dan rezim yang diakui secara internasional. Karena dalam peristiwa revolusi tersebut telah berhasil menjadikan Iran sebagai negara *Syiah* pertama, yang berdasarkan pada konsep politik *Syiah Imamiyah* untuk bentuk dan sistem pemerintahan yang dijalankannya (Kadir, 2015:2). Iran menganggap paham Islam *Syiah* sebagai dunia Islam yang seharusnya. Hal tersebut membuat Arab Saudi merasa terancam karena Revolusi Islam Iran bertentangan dengan landasan ideologis negara Saudi yang merupakan pemimpin dunia Islam dan juga sebagai tempat rujukan bagi umat Islam. Selain itu, rezim baru yang ditetapkan oleh Iran juga tetap memiliki tujuan yang sama dengan Arab Saudi, yaitu menjadi hegemoni regional di Timur Tengah.

Pembahasan dimulai dari persepsi kontestasi ideologi dari isu Israel-Palestina yang melibatkan Saudi dan Iran, dengan merujuk pada konsep ideologi dan definisi dari konsep regionalisme, dimana sebuah kebijakan dapat di bentuk dengan tujuan untuk mencapai sebuah kepentingan dan tujuan yang sama antar anggota dalam menyelesaikan permasalahan di kawasan tertentu (Soderbaum, 2011:3). Konsep pertama yang menurut penulis selaras dengan konteks persaingan ideologi yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran ini adalah konsep hegemoni regional dari John J. Mearsheimer yang mengatakan bahwa negara yang termasuk dalam great power akan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan atas lawan mereka untuk menjadi hegemon (Mearsheimer, 2001:40). Lalu, sesuai dengan indikator konsep hegemoni tersebut, pembahasan mencakup kepentingan serta upaya Arab Saudi (*great power*) sebagai

fokus penelitian ini. Kemudian mencakup aksi-reaksi dengan Iran dalam menekankan aspek persaingan di antara kedua negara. Pembahasan juga mencakup persepsi Arab Saudi terhadap Iran sebagai sebuah ancaman. Untuk mendukung konsep hegemoni, mengenai pespektif bahwa negara membutuhkan aliansi untuk menghindari munculnya ancaman dominasi dari *great power* lainnya, dapat dipahami melalui *Balance of Power Theory* (Walt, 1985:4). Selain itu, dengan merujuk pada konsep *balance of power*, negara akan beraliansi dengan kekuatan dominan untuk menyeimbangkan kekuatan dari rival-nya, dan juga dengan negara yang lemah untuk mempermudah proses dominasinya (Martin, 2003:68). Hal tersebut penulis sajikan dalam pembahasan mengenai pembentukan aliansi (penggabungan kekuatan) Arab Saudi dengan Amerika Serikat, dan negara-negara dunia Muslim. Lebih lanjut sesuai dengan pendapat Gramsci yang menjelaskan bahwa penerimaan ideologis kelas yang menghegemoni akan memperoleh ketertundukan dari kelas yang terhegemoni (Siswati, 2017:26). Maka penulis juga menyajikan gambaran persaingan di antara kedua negara melalui kondisi ketertundukan negara-negara sekutu pada bagian akhir pembahasan mengenai kontestasi ini.

Persepsi Kontestasi Ideologi melalui Kebijakan Luar Negeri dan Isu Israel-Palestina

Dalam pengertian diplomasi secara mikro, diplomasi hanya berfokus pada peristiwa-peristiwa politik yang sedang dihadapi negara dan pemerintahannya saja. Dapat dikatakan pula bahwa diplomasi mikro merupakan sebuah instrumen sebagai pengambil atau pembuat kebijakan luar negeri. Diplomasi merupakan instrumen dalam kebijakan luar negeri yang terkait dengan kekuatan ekonomi atau militer untuk memungkinkan aktor mencapai tujuan kebijakannya, yang juga merupakan kepentingan nasionalnya (White, 2001:389). Kebijakan politik luar negeri utama yang diterapkan oleh Arab Saudi adalah kebijakan *neighbour friendly*, yang ditujukan untuk mempererat hubungan baik melalui Liga Arab, Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Arab Maghreb Union, dan negara-negara kawasan yang terlibat dalam perjanjian internasional lainnya. Arab Saudi juga menerapkan kebijakan non-intervensi terhadap masalah internal di negara lain. Selain itu, Arab Saudi mengadopsi kebijakan Non-Blok dan memainkan peran efektif dalam organisasi-organisasi internasional (The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, 2003). Karakter politik Arab Saudi dapat dengan mudah mengadopsi narasi besar "Iranophobia" yang disebarluaskan oleh Barat (Amerika Serikat dan Inggris), dan Israel.

Berbeda dengan Iran, sesuai dengan konstitusi yang berlaku pasca peristiwa revolusi, Iran memiliki 5 prinsip kebijakan luar negeri yang diterapkan hingga saat ini (Phoenna, 2016:4-5): Pertama, Iran menentang campur tangan dan juga kekuasaan dominan negara asing di Kawasan Timur Tengah. Kedua, Iran tidak mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Lalu, Iran juga tidak menyetujui kesepakatan damai Israel-Palestina. Namun hal ini berbanding terbalik dengan sekutu Arab Saudi seperti Mesir, UEA, dan Bahrain yang menandatangani kesepakatan ini atas persetujuan dari Arab Saudi (ICDS, 2020). Keempat, Iran selalu mempertahankan wilayah Thumbs Besar, Thumbs Kecil, Shatt Al-Arab, dan Abu Musa di Selat Hormuz dari klaim negara-negara lain. Kelima, pasca revolusi Iran, prinsip politik luar negeri Non-Blok diadopsi oleh Iran. Dalam konflik Israel-Palestina, Arab Saudi dan Iran menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menyesuaikan masalah tersebut. Arab Saudi dengan mempromosikan rencana perdamaian dan Iran dengan mendanai kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah (The Atlantic, 2021).⁴

⁴ Hamas merupakan kelompok militan Palestina yang mengendalikan Gaza. Hizbullah merupakan organisasi politik dan militer yang berasal dari kelompok *Syiah* dengan didukung oleh Iran, yang berdiri sejak 1982.

Kepentingan Arab Saudi di Kawasan Timur Tengah

Arab Saudi berdiri di tengah banyak masalah dan krisis yang dihadapi oleh Timur Tengah, dunia Islam, dan tatanan global yang lebih luas saat ini. Arab Saudi di Kawasan Timur Tengah tentu memiliki kepentingan nasional untuk mengembangkan negaranya, dan upaya pencapaiannya dapat melalui keterlibatan dalam suatu konflik dan juga kerja sama yang dijalin oleh beberapa negara besar maupun kecil. Kepentingan nasional Arab Saudi yang paling utama adalah menjadi satu-satunya hegemon di kawasan ini. Hal ini juga didukung oleh penyebaran pengaruh aspek ideologi Sunni dalam tujuan untuk mendominasi Kawasan Timur Tengah. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki kepentingan dalam penguasaan akses minyak dan kepentingan politik. Dalam hal ini, Iran yang juga sebagai negara kuat di kawasan, menjadi lawan bagi Arab Saudi dalam berlomba untuk menjadi satu-satunya negara hegemon di Timur Tengah.

Kepentingan tersebut yang melatarbelakangi dari beberapa tindakan-tindakan yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran. Pertama, keterlibatan perang kata antara Arab Saudi dan Iran pada awal bulan Mei 2017. Faktor pemicu adanya perang kata ini adalah saat Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyatakan bahwa, setiap kontestasi untuk mempengaruhi antara kerajaan Muslim *Sunni* dan teokrasi Iran harus berlangsung di Iran (Reuters, 2017a). Kedua, Arab Saudi melibatkan diri secara 'diam-diam' untuk mencapai kepentingannya dengan beberapa negara. Seperti Saad Al-Hariri yang menjabat sebagai Perdana Menteri Lebanon.⁵ Arab Saudi juga menaruh kepentingannya pada konflik Yaman yang berlangsung sejak 2015 lalu. Konflik Yaman ini juga merupakan medan *proxy war* antara Iran dan Arab Saudi. Yaman memiliki jalur strategis yang dilewati oleh semua hasil minyak dari berbagai negara teluk khususnya Arab Saudi, yang bernama Selat El Mandab (Putra, 2019:83).

Apabila Yaman berada di bawah kendali Iran, maka kebijakan pendistribusian minyak akan dikendalikan langsung oleh Iran. Sebagai akibatnya, Iran akan dengan mudah menguasai jalur perdagangan minyak di Timur Tengah. Kekhawatiran tersebut muncul karena Arab Saudi tidak ingin julukan 'pengontrol utama' dalam hal minyak ini jatuh kepada rivalnya. Selain itu, dalam konflik ini juga menjadi tempat perlombaan pengaruh *Sunni* dan *Syiah*. Iran memberikan dukungan dalam bentuk politik dan militer kepada kelompok pemberontak Houthi sebagai salah satu bentuk penyebaran pengaruh *Syiah* di Yaman (Putra, 2019:84). Arab Saudi sendiri telah melakukan intervensi militer pada konflik ini, yang mendukung pihak pemerintah Yaman dalam memerangi kelompok Houthi.

Persepsi Arab Saudi terhadap Iran sebagai Sebuah Ancaman

Kontestasi hegemoni ideologi yang terjadi antara dua negara ini juga dapat dilihat dari ancaman-ancaman Iran. Dalam kasus rezim Arab Saudi, persepsi ancaman berulang kali mendominasi kebijakan regional. Contoh awal sikap Iran yang mengancam Kerajaan Arab Saudi adalah dengan adanya Revolusi Republik Islam Iran. Selain itu, terlihat pada September 2016, Pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Khamenei menuduh Arab Saudi telah membunuh para Jemaah Haji dalam tragedi Mina pada Haji tahun lalu, dan dunia Muslim seharusnya mempertimbangkan kembali manajemen Arab Saudi atas dua situs suci Islam di Mekah dan Madinah (Sindo News, 2016). Sebelumnya pada Mei 2016, Iran memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam ibadah Haji ke Mekah, setelah kedua negara gagal dalam mencapai kesepakatan mengenai pengaturan Haji bagi warga Iran.

⁵ Hariri merupakan sekutu dari Arab Saudi yang juga menganut paham Islam *Sunni*. Hariri juga merupakan aliansi utama Arab Saudi di Lebanon, yang mampu memainkan peran secara mayoritas dalam pemerintahan Lebanon yang didominasi oleh Hizbullah.

Selanjutnya, ancaman tersebut juga dilakukan melalui serangan *drone* dan rudal balistik oleh kelompok pemberontak Houthi, dengan dukungan Iran terhadap wilayah kedaulatan Arab Saudi. Setiap tahunnya serangan tersebut selalu mengganggu dan merusak fasilitas vital Arab Saudi. Dimulai pada tahun 2018 hingga tahun 2019, yang pada akhirnya melukai warga sipil yang berada di kota-kota padat penduduk yang menjadi target kelompok Houthi. Kemudian pada bulan Mei 2019 Houthi menyerang kilang minyak di bagian barat Riyadh yang bernama *The Aramco East-West Pipeline* (Aljazeera, 2019a). Pada tahun yang sama, tepatnya pada Juni Bandara Abha juga diserang oleh Houthi yang mengakibatkan 26 orang terluka (Reuters, 2019). Pada tahun 2021, *drone* yang memuat rudal balistik milik kelompok pemberontak Houthi kembali menyerang ladang minyak strategis Arab Saudi. Tepatnya pada 7 Maret 2021, fasilitas Saudi Aramco di Ras Tanura menjadi target serangan kelompok tersebut (VOA, 2021). Pesawat nirawak yang berhasil diamankan oleh Arab Saudi, menunjukkan 2 diantaranya merupakan *drone* peledak '*Samad*' buatan Iran (Sindo News, 2021).

Arab Saudi dan Amerika Serikat

Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, Arab Saudi telah berusaha untuk mempertahankan aliansi eksternal. Penggabungan kekuatan dengan negara besar, atau *super power* ini ditujukan untuk membantu Arab Saudi dalam melawan ancaman Iran. Terutama dengan Amerika Serikat sebagai *super power* dunia, dengan tujuan untuk meningkatkan postur keamanan negara melalui pencegahan terhadap penyerang regional, hal itu juga membantu memberikan tentara Saudi, angkatan laut, dan angkatan udara akses ke peralatan terbaru yang tersedia di pasar internasional. Kedekatan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat terlihat pada 20 Mei 2017. Keduanya mengadakan pertemuan untuk membicarakan masa depan Arab Saudi di Kawasan Timur Tengah, yang juga diikuti dengan penandatanganan kontrak perjanjian senjata senilai 100 miliar dolar (Reuters, 2017b). Hal ini ditujukan sebagai bantuan untuk Arab Saudi meningkatkan kemampuan pertahanannya dalam memerangi terorisme dan melawan Iran. Arab Saudi juga berharap kepada Amerika Serikat untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap rezim Iran (Aljazeera, 2017).

Lalu, saat pemberontak Houthi menyerang dua fasilitas minyak utama Aramco milik Arab Saudi pada 14 September 2019, tepatnya di Abqaiq, yang merupakan pabrik pengolahan minyak terbesar Aramco (Aljazeera, 2019). Arab Saudi meminta masyarakat internasional untuk bertindak tegas terhadap perilaku rezim Iran. Kemudian Amerika Serikat meningkatkan sanksi kepada Iran dan bersama dengan sekutu utama Arab Saudi, UEA dan Bahrain membangun koalisi yang bertujuan mencapai perdamaian dan resolusi damai (France 24, 2019). Amerika Serikat juga berusaha untuk membentuk aliansi keamanan maritim global sejak adanya serangan terhadap kapal tanker minyak di perairan Teluk, yang juga dituduhkan kepada Iran. Kejadian tersebut berlangsung pada bulan 5 Juli 2018, kapal tanker milik Arab Saudi diserang oleh pemberontak Houthi tepat di Laut Merah. Selanjutnya, pada saat awal tahun 2020, komandan Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Iran (IRCG), yang bernama Jenderal Qassem Soleimani telah menjadi sasaran pesawat nirawak Amerika Serikat. Arab Saudi menempatkan diri sebagai sekutu Amerika Serikat dan membiarkan penambahan pasukan angkatan udara Amerika Serikat di Pangkalan Udara Prince Sultan (Courthouse News, 2020).

Arab Saudi dalam Aliansi Militer Islam Anti Terorisme

Arab Saudi juga membuat aliansi dengan negara-negara Muslim di dunia dengan membentuk *Islamic Military Counter Terrorism Coalition* (IMCTC). Bagi Putera Mahkota Mohammed bin Salman yang telah mengkonsolidasikan kendali atas negara, aliansi ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin dunia Arab pada saat kepemimpinan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah (DW, 2017). Aliansi ini berkantor pusat di Riyadh dan dibentuk oleh Putera Mahkota Arab Saudi pada 15 Desember 2015 (Al Ghafli, 2017:157). Aliansi ini juga merupakan sinyal bagi dunia Arab bahwa Arab Saudi menginginkan untuk menetapkan agenda utama dalam kebijakan regional dan instrumen lain untuk menghambat pengaruh *Syiah* Iran.

Aliansi tersebut tidak mencakup negara-negara dengan pemerintahan yang didominasi oleh *Syiah*. Pada Januari 2020, IMCTC menandatangani nota kerja sama dengan OKI (IMCTC, 2020). Kemitraan strategis ini hadir dalam kerangka kerja sama aliansi dengan organisasi internasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan, dan memerangi semua bentuk terorisme dan ekstremisme, serta pembiayaan mereka. Dengan mayoritas Islam *Sunni* dalam aliansi ini, memicu persepsi bahwa pembentukan aliansi ini merupakan upaya Arab Saudi dalam mengambil peran utamanya di Timur Tengah dalam persaingannya melawan Iran. Ditambah dengan pembentukan aliansi ini yang dipimpin oleh Arab Saudi yang merupakan pemegang peran penting dalam OKI.

Ketertundukan Negara-negara Sekutu

Ketertundukan sekutu Arab Saudi jauh lebih unggul dibandingkan dengan ketertundukan sekutu Iran. Hal ini dikarenakan Arab Saudi yang merupakan hegemoni yang termasuk negara *status quo* lebih memiliki kekuatan untuk mengatur segala kebijakan di berbagai organisasi internasional kawasan, untuk melawan Iran dan sekutunya. Setelah berhasil melakukan penggabungan kekuatan dengan negara *super power* dan *non-super power*, Arab Saudi juga berusaha untuk terus membuat sekutu-sekutunya mengikuti arahan dari pihaknya. Hal ini sering sekali dilakukan saat dalam pertemuan-pertemuan seperti OKI dan Liga Arab. Seperti saat setelah berlangsungnya pertemuan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi pada 2017 lalu, tepatnya pada 5 Juni 2017, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar.⁶ Tindakan tersebut disusul oleh sekutunya yaitu, Bahrain, Mesir, Libya, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Maladewa (BBC News Indonesia, 2017). Negara-negara tersebut menyebutkan bahwa Qatar telah mengganggu keamanan Kawasan Teluk.

Lebih lanjut dalam Pertemuan Luar Biasa Liga Arab yang diselenggarakan di Kairo pada November 2017, Arab Saudi dan sekutunya mengecam Iran atas penyerangan rudal yang dilakukan oleh kelompok Houthi terhadap beberapa bandara di Arab Saudi (RFEL, 2017). Pertemuan tersebut juga membahas mengenai *Hizbullah* yang merupakan bagian dari pemerintah Lebanon yang terdiri dari faksi-faksi yang bersaing, dan menolak untuk menerima pengunduran diri Hariri dan menuduh Arab Saudi menahan perdana menteri di luar keinginannya. Hariri mengkritik Iran dan *Hizbullah* karena ikut campur di negara-negara Arab. Liga Arab juga menuduh *Hizbullah* telah mendukung terorisme dan kelompok ekstremis di negara-negara Arab dengan senjata canggih dan rudal balistik. Arab Saudi menyebut pertemuan itu sebagai bagian dari upaya terbaru untuk meningkatkan tekanan terhadap rival *Syiah* nya. Arab Saudi dan Bahrain juga telah

⁶ Pemutusan tersebut berdasarkan atas dua faktor yang mendukung keputusan itu, yang pertama adalah hubungan yang dijalin Qatar dengan kelompok Islam radikal. Kedua, dukungan Qatar terhadap Iran yang merupakan rival dari Arab Saudi.

meminta negara-negara Arab untuk bersatu dan menghadapi Iran atas perannya dalam konflik regional dan dukungannya terhadap kelompok terorisme dan ekstrimisme.

Dalam persaingan ini, Iran juga mendapat dukungan dari negara besar di luar kawasan maupun negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Rusia dan Cina memberikan dukungan bersifat politis, dan juga termasuk penjualan senjata atau transfer teknologi (Middle East Forum, 2010). Namun, secara umum dukungan yang diberikan tersebut, tidak lebih penting dari dukungan yang diberikan Amerika Serikat untuk Arab Saudi. Iran juga memiliki sekutu utama di Kawasan Timur Tengah, yaitu Lebanon, Suriah, dan Irak. Iran terkait erat dengan kelompok milisi religius di Timur Tengah yang didukung dan dilatih oleh Iran sendiri di negara-negara termasuk Irak, Lebanon, Suriah, Yaman, dan Jalur Gaza (Investopedia, 2020). Dalam hal ini, Iran lebih banyak mengeluarkan dukungan untuk sekutunya. Dukungan tersebut merupakan cara Iran untuk membuat negara-negara tersebut tunduk dan mengikuti kemauan dari Iran. Oleh karena itu Iran dapat menyebarkan paham *Syiah*-nya di negara-negara sekutunya, untuk melawan paham *Sunni* dari Arab Saudi.

Persaingan antara kedua negara memberikan dampak kepada Kawasan Timur Tengah dan OKI. Dinamika keamanan dan kestabilan di Timur Tengah ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu konflik Palestina-Israel dan persaingan antara Arab Saudi dan Iran (Ejaz, 2018:1). Kawasan Timur Tengah ini menjadi tempat tarik-menarik kepentingan nasional antara kedua negara tersebut, untuk meningkatkan pengaruhnya dan melemahkan negara lain. Kedua negara tersebut memainkan perang proksi secara agresif dalam konflik negara lain di Timur Tengah, seperti pada perang Suriah, Yaman, Irak, dll. Adanya persaingan yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran juga membawa dampak bagi organisasi-organisasi tersebut. Dalam menjaga nilai-nilai Islam yang sebenarnya, OKI sendiri telah mengambil berbagai langkah untuk menghilangkan mispersepsi dan sangat menganjurkan penghapusan diskriminasi terhadap Muslim dalam segala bentuk.

Fokus pembahasan dalam pembahasan berikutnya akan merujuk pada tantangan dari konsep regionalisme dengan adanya persaingan memperebutkan pengaruh, dan posisi kepemimpinan regional dapat merusak kerja sama kawasan (Fawcett, 2004:444), dalam menjabarkan mengenai pola interaksi di Kawasan Timur Tengah. Kemudian merujuk pada teori *balance of power*, yang mencakup ketidakstabilan Kawasan Timur Tengah akibat dari aliansi ofensif kedua negara (Raju, 2012:23). Ketidakstabilan Kawasan Timur Tengah juga mencakup terjadinya *proxy war*. Lalu, sesuai dengan teori realisme yang menjadikan organisasi internasional sebagai medan untuk mempraktikkan *balance of power* (Measheimer, 1995:12), pembahasan juga mencakup dampak dari persaingan Arab Saudi dan Iran menjadikan Arab Saudi menggabungkan kekuatan dengan OKI untuk mencegah kegagalan dalam memenangkan persaingannya dengan Iran, dan memanfaatkan negara-negara anggota OKI untuk berpihak pada Arab Saudi.

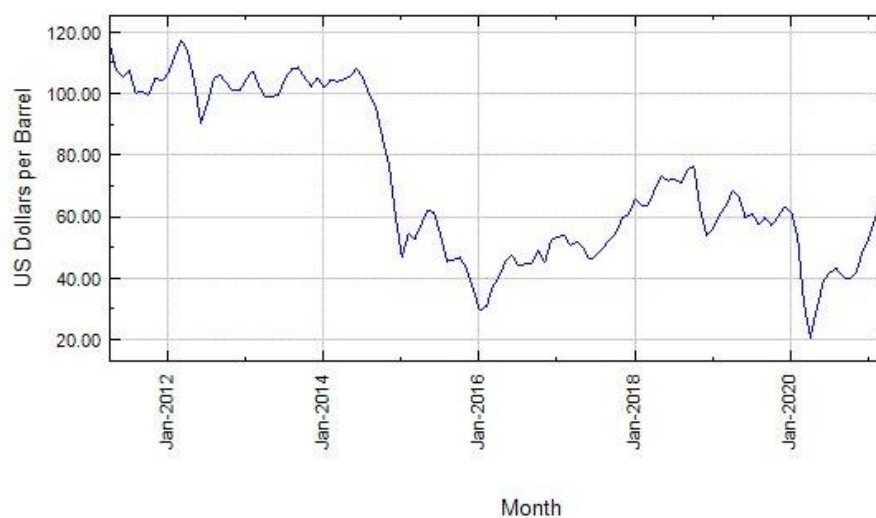
Tipologi Pola Interaksi Kawasan Timur Tengah

Dalam penelitian ini melihat pola interaksi melalui konflik Suriah dan kehadiran Garda Quds. Jika melihat pada fenomena konflik di Suriah, sistem pola interaksi yakni bipolar, dimana terdapat dua negara yang paling kuat di dunia yang diharapkan dapat bertindak untuk memelihara sistem. Salah satu negara yang terlibat dalam pemetaan konflik Suriah yakni Iran dan Arab Saudi. Posisi politis Iran dan Suriah memiliki hubungan yang baik dari masa terjadinya revolusi dan memberi dukungan penuh terhadap rezim Assad dalam mempertahankan kekuasaannya. Hubungan kedua negara sangat erat, dan hubungan aliansi mereka semakin kuat, sehingga Suriah bergantung pada bantuan Iran.

Iran membutuhkan sekutu untuk membantu mempertahankan kelangsungan hidupnya di Timur Tengah dalam menghadapi pengaruh besar Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Israel. Iran mengakui peranan Al-Quds dalam serangkaian konflik di Suriah, salah satu tugasnya adalah memberikan konsultasi bagi pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad, dan menyediakan ribuan milisi Syiah di Suriah dan Irak (Britanica, 2021). Oleh karena itu pola interaksi dalam hubungan internasional yakni, melalui kerja sama antarnegara yaitu Iran dan Irak pada terjadinya konflik di Suriah, yang kemudian melawan Pemerintahan Amerika Serikat yang menyerang kedua negara tersebut di dalam terjadinya konflik Suriah dan Garda Quds. Bentuk pola interaksi tersebut dengan sistem *bipolar* yakni konsep *balance of power* atau perimbangan kekuatan bahwa terdapat dua negara berkekuatan besar yang bertindak untuk memelihara sistem. Iran Bersama Rusia dan Hizbullah dari Lebanon mendukung pemerintahan Bashar Al-Assad sedangkan Arab Saudi berpihak pada oposisi yang didukung oleh Turki, Amerika Serikat, Yordania, dan Libya.

Ketidakstabilan Kawasan Timur Tengah

Ketegangan regional yang dihasilkan dari persaingan Arab Saudi dan Iran memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi, politik, dan keamanan kawasan. Adanya penyerangan terus-menerus terhadap kilang minyak Arab Saudi yang dilakukan oleh pemberontak Houthi, menyebabkan adanya fluktuasi harga minyak mentah. Arab Saudi sebagai pengontrol dan pemasok minyak mentah terbesar menimbulkan kekhawatiran akan pertahanan dan kemampuan ekspor minyaknya. Lebih lanjut, persaingan antara Arab Saudi dan Iran dapat menyebabkan gangguan pasokan minyak dengan dampak yang dapat diprediksi melalui harga minyak mentah dunia.



Gambar 1. Harga Minyak Mentah Dunia 10 Tahun, 2020

Sumber: Saham OK, 2020

Secara tidak langsung, kenaikan harga minyak dan pelemahan produksi dapat diartikan sebagai pertanda akan kelangkaan minyak di dunia yang dapat menghambat aktivitas ekonomi di negara-negara industri. Sebaliknya, penurunan harga minyak dapat mengakibatkan negara-negara mengalami destabilisasi ekonomi (VOA Indonesia, 2020). Hal tersebut dikarenakan harga minyak yang lemah dapat menyerang pendapatan potensial negara-negara pengekspor, memotong aliran pendapatan mereka dan pada gilirannya mengurangi permintaan.

Persaingan antara Arab Saudi dan Iran telah menimbulkan *proxy war* pada beberapa konflik negara lain di Timur Tengah. Hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan politik yang semakin memburuk pada Kawasan Timur Tengah. Keterlibatan kedua negara dengan beberapa konflik Timur Tengah semakin menghambat adanya proses perdamaian. Dampak lainnya yang dihasilkan dari persaingan kedua negara, khususnya dalam melakukan konflik secara *proxy war* adalah banyaknya korban jiwa yang merupakan penduduk sipil. Sejak Maret 2015, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) telah memverifikasi dan mengkonfirmasi pembunuhan 7.734 warga sipil, dan luka-luka bagi 12.269 lainnya karena serangan sembarangan, ranjau darat, alat peledak improvisasi, dan penyimpanan senjata dan bahan peledak di daerah pemukiman oleh semua pihak yang berkonflik (Security Council Report, 2020). Apabila Arab Saudi dan Iran terus-menerus melakukan *proxy war* atau konflik bersenjata lainnya, maka akan semakin bertambahnya warga sipil yang menjadi korban sehingga akan memperburuk krisis kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah.

Peningkatan Hubungan Antara OKI dan Arab Saudi

Arab Saudi dan Iran merupakan anggota OKI, namun sejak pembentukan OKI, Arab Saudi telah mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dunia Muslim. Arab Saudi memandang OKI melalui lensa geopolitik, yang secara bersamaan berusaha untuk menegaskan kepemimpinannya dengan mengambil inisiatif dalam menguraikan tujuan bersama yang dapat dilakukan OKI di bawah arahnya (Akbarzadeh & Ahmed, 2017: 6). Oleh karena itu, mengubah suasana persaingan strategisnya dengan Iran menjadi prioritas bagi Arab Saudi apa pun yang terjadi. Potensi perpecahan yang dapat ditimbulkan dari tarik-menarik kepentingan antara Arab Saudi melawan Iran, bertentangan dengan tujuan dan juga Piagam OKI yang ingin membuat dunia Muslim damai. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa tingkat Menlu OKI, yang diselenggarakan pada tanggal 14 – 15 Agustus 2012 di Arab Saudi, OKI telah menyepakati untuk menanggukkan status keanggotaan Suriah terkait konflik yang sedang terjadi di Suriah (Organization of Islamic Cooperation, 2012).⁷

Kemudian pada KTT OKI ke-13 yang diselenggarakan pada 2016 di Turki. KTT tersebut umumnya membahas mengenai kesatuan dan solidaritas untuk menciptakan keadilan dan perdamaian bagi dunia Muslim. Namun pada Poin 30 – 34 terdapat kecaman yang ditujukan untuk Iran secara langsung.

30. The Conference stressed the need for the cooperative relations between Islamic States and the Islamic Republic of Iran to be based on the principle of good-neighborliness, non-interference in their domestic affairs, respect for their independence and territorial sovereignty, resolving differences by peaceful means in accordance with the OIC and the UN charters and the principles of international law, and refraining from the use or threat of force.
31. The Conference condemned the aggressions against the missions of the Kingdom of Saudi Arabia in Tehran and Mashhad in Iran, which constitute a flagrant violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the Vienna Convention on Consular Relations, and international law which guarantees the inviolability of diplomatic missions.
32. The Conference rejected Iran's inflammatory statements on the execution of judicial decisions against the perpetrators of terrorist crimes in the Kingdom of Saudi Arabia, considering those statements a blatant interference in the internal affairs of the Kingdom of Saudi Arabia and a contravention of the United Nations Charter, the OIC Charter and of all international covenants.
33. The Conference deplored Iran's interference in the internal affairs of the States of the region and other Member States including Bahrain, Yemen, Syria, and Somalia, and its continued support for terrorism.
34. The Conference underscored the need to shun the sectarian and denominational agenda as it carries destructive impacts and serious repercussions for Member States' security and stability and for international peace and security. It stressed the importance of reinforcing relations of good neighborliness among the Member States for the good interest of peoples, consistent with the OIC Charter.

Gambar 2. *Final Communique of The 13th Islamic Summit Conference (Unity and Solidarity for Justice and Peace), 2016*
Sumber: *OIC Istanbul Summit, 2016*

⁷ OKI memutuskan untuk menanggukkan keanggotaan Suriah dalam Organisasi Kerja Sama Islam termasuk semua organ anak perusahaan, lembaga khusus dan afiliasinya berdasarkan rekomendasi dari Komite Eksekutif Menteri yang diadakan di Jeddah pada 24 Juni 2012.

Dengan sikap keberpihakan OKI terhadap Arab Saudi tersebut, merupakan kesenjangan kredibilitas antara cita-cita yang dianut OKI dengan praktik aktualnya. Hal ini akhirnya menimbulkan klaim bahwa organisasi internasional dapat digunakan oleh salah satu negara anggota untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang mengakibatkan proses perdamaian yang seharusnya dapat dilakukan dengan keterlibatan OKI, menjadi terhambat.

Analisis Diplomasi Arab Saudi melalui OKI

Arab Saudi telah memilih arena diplomatik formal OKI untuk melawan posisi Iran dan untuk mendapatkan dukungan diplomatik dari negara-negara Muslim. Terlepas dari kepentingan ini, Arab Saudi juga telah menjadi pokok kekuatan OKI sejak awal dan menjalankan organisasi secara finansial sebagai poin penunjang utamanya. Tidak mengherankan jika OKI telah selaras dengan kepentingan Arab Saudi. Sedangkan persaingan yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran merupakan perebutan kekuasaan, kedua negara bermain dengan politik identitas sektarian untuk mengejar agenda geopolitik mereka. Hal ini membuat kebijakan OKI menjadi kurang arah dan ketergantungan terbuka pada Arab Saudi. Terlepas dari upayanya untuk mempengaruhi dunia Muslim, Iran tidak dapat menandingi sumber daya keuangan yang signifikan khususnya, yang telah dicurahkan oleh Arab Saudi untuk OKI. Arab Saudi telah memperoleh pengaruh yang tak tertandingi atas organisasi ini. Akibatnya, OKI telah direduksi menjadi instrumen kebijakan luar negeri Arab Saudi dengan bias anti-Iran, untuk menggunakan pengaruhnya untuk keuntungan politik dan ideologisnya sendiri (Ahmed & Akbarzadeh, 2019:13).

Pembahasan ini akan merujuk pada konsep diplomasi dengan metode *soft* dan *hard diplomacy* (Prayuda & Sundari, 2019:86). *Soft Diplomacy*, merupakan diplomasi yang dilakukan dalam bentuk *soft power* atau penyelesaian secara damai, misalnya dalam bentuk dialog, kunjungan negara, negosiasi, dan melobi. Penggunaan *soft power* sendiri ditujukan untuk mendapatkan keinginan tanpa adanya paksaan atau sanksi. Hal ini yang menyebabkan *soft diplomacy* dapat dikatakan sebagai sumber pengaruh (Nye, 2008:95). *Hard Diplomacy*, merupakan diplomasi yang dilakukan dengan cara meningkatkan kekuatan militer untuk efek penangkalan atau yang sering disebut dengan *hard power* (Prayuda & Sundari, 2019:86). Contoh tindakan dari *hard diplomacy* adalah dalam bentuk perang, seperti agresi militer, politik, sanksi ekonomi, serta diplomasi koersif. Diplomasi ini berfungsi sebagai metode memaksa agar mematuhi keinginan negara yang melakukan *hard diplomacy* ini. Penggunaan cara *soft diplomacy*, yaitu dengan pendanaan yang diberikan oleh Arab Saudi untuk OKI, pernyataan dari Arab Saudi dengan tujuan membentuk opini negara anggota OKI. Akibatnya, pernyataan tersebut membuat beberapa kebijakan OKI ditujukan untuk menyudutkan Iran. Arab Saudi juga mendominasi dalam struktur organisasi OKI, yang dapat membuat segala kebijakan dan kegiatan OKI menjadi sejalan dengan kepentingan Arab Saudi. Pembahasan juga mencakup metode *hard diplomacy*, seperti pemblokiran Iran dari beberapa KTT OKI yang dilakukan dengan sengaja oleh Arab Saudi.

Pernyataan Arab Saudi dan Kebijakan OKI

Arab Saudi menyebarluaskan pengaruh ideologinya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya. Hal tersebut pada akhirnya akan menentukan arah suatu kebijakan menjadi sesuai dengan keinginan Arab Saudi. Arab Saudi yang melibatkan kebijakan luar negerinya melalui OKI. Artikulasi kebijakan luar negeri terutama ditujukan untuk memajukan kepentingan nasional, yaitu mengkonsolidasikan aliansi dan meningkatkan kekuatan regional, tetapi untuk Arab Saudi dan Iran, perbedaan antara paham ideologi

Sunni dan *Syiah* telah secara signifikan berperan dalam perhitungan kebijakan ini dalam kaitannya dengan Kawasan Timur Tengah dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) (Ahmed & Akbarzadeh, 2019:2). Pertama, melalui permasalahan haji, ulama utama dari Arab Saudi menyatakan bahwa Iran melakukan upaya untuk mempolitisasi haji dan mengubahnya menjadi kesempatan untuk melanggar ajaran Islam, dengan meneriakkan slogan-slogan dan mengganggu keamanan peziarah (The Daily Star, 2016). Kemudian pada 12 September 2016, Sekretaris Jenderal OKI mengeluarkan pernyataan serupa bahwa menggunakan haji untuk memaksakan arah politik adalah salah dan ofensif, bertentangan dengan resolusi yang dikeluarkan oleh OKI tentang haji, hanya dapat menyebabkan lebih banyak perpecahan dan hasutan dalam Islam dan bangsa, dan bertentangan dengan semangat-tajdi dan ikatan yang diwakilinya (Arab News, 2016).

Selanjutnya, pernyataan-pernyataan Arab Saudi yang terus menyebutkan bahwa Iran merupakan sponsor kelompok terorisme, yang pada akhirnya membuat beberapa dokumen OKI menjadikan terorisme sebuah isu penting. Sejak 2017, Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan bahwa Iran merupakan negara sponsor terorisme (The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, 2017). Pada April 2018, Putra Mahkota Saudi berbicara tentang "*the triangle of evil*" di mana Iran memainkan peran kunci dalam mempromosikan ekstremisme (Al Arabiya, 2018). "*The triangle of evil*" merupakan sebutan untuk Iran, sekutu dari Iran, dan kelompok teroris yang memiliki peran dalam mendistorsi dunia Muslim untuk mencapai ambisi mereka, dan percaya bahwa ideologi *Syiah* yang mereka pahami akan menguasai dunia Muslim. Beberapa dokumen OKI terbukti telah menunjukkan tekanan terhadap Iran dengan menggambarkan bagaimana ekstremisme dan terorisme dikaitkan dengan Iran. OKI mendefinisikannya dalam Deklarasi Dhaka 2018 dengan menyatakan bahwa terorisme terdiri dari kegiatan seperti penyediaan senjata dan pendanaan terorisme (The Dhaka Declaration, 2018:6). Salah satu pertemuan khusus tersebut diadakan pada Agustus 2018 di Jeddah, atas respon dari terjadinya serangan oleh pemberontak Houthi terhadap kapal tanker minyak Saudi di Laut Merah pada Juli 2018, yang mengakibatkan penangguhan kapal tanker minyak Saudi agar tidak lewat melalui Selat *Beb Al-Mandeb* (Arab News, 2018).

Dalam komunikasi akhir dari pertemuan tersebut, OKI menegaskan bahwa serangan tersebut terjadi di tengah operasi teroris serupa yang dilakukan oleh milisi pemberontak Houthi, atas dukungan Iran terhadap lalu lintas maritim internasional dan perdagangan internasional (Organization of Islamic Cooperation, 2018a). Kemudian pada 27 September 2018, Sekretaris Jenderal OKI mengadakan pertemuan yang khusus untuk membahas mengenai situasi di Yaman. Pertemuan tersebut dilaksanakan di New York, Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Arab Saudi. Dalam draft laporan hasil pertemuan tersebut, khususnya pada Poin 5 tertera OKI memuji upaya besar yang dilakukan oleh koalisi aliansi yang dipimpin oleh Arab Saudi untuk meringankan krisis kemanusiaan di Yaman (Organization of Islamic Cooperation, 2018b). Di sisi lain dalam pertemuan tersebut, OKI mengecam semua pelanggaran yang dilakukan oleh pemberontak Houthi, yaitu penangkapan, pembunuhan, perekrutan anak-anak untuk berperang, pengepungan kota, penolakan akses kemanusiaan kepada mereka yang terkena dampak, penjarahan dana, desakan operasi militer di dalam Yaman dan lintas batas, mengancam pergerakan navigasi di koridor perairan internasional dan regional, dan kejahatan perang lainnya yang dapat dihukum berdasarkan hukum internasional, hukum humaniter internasional dan kovenan internasional.

Kepemimpinan Arab Saudi dalam Struktur Organisasi OKI

Dalam upayanya untuk mempertahankan *status quo*, Arab Saudi terus berusaha dengan menggunakan semua kemungkinan cara dan sarana untuk menghambat pengaruh Iran di Timur Tengah. Ketundukan mayoritas negara-negara anggota OKI memberikan kekuasaan penuh kepada Arab Saudi untuk mengklaim peran kepemimpinan organisasi tersebut. Arab Saudi juga menjalankan diplomasinya melalui dominasi terhadap struktur organisasi OKI. Hal tersebut ditunjukkan untuk melancarkan arah informasi antar negara yang menjadi anggota OKI, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan *soft diplomacy* yang dijalankan oleh Arab Saudi. Diawali dengan sekretaris jenderal yang merupakan organ eksekutif OKI yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dengan beberapa staff Sekjen (Organization of Islamic Cooperation, 1970). Selama dua periode berturut-turut sejak 2014, kedudukan Sekjen OKI diisi oleh politikus dari Arab Saudi. Pada tahun 2014 hingga 2016, Saudi Iyad bin Ameen Madani, setelah itu digantikan oleh Yousef Bin Ahmad Bin Abdul Rahman Al-Othaimeen, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Arab Saudi. Kemudian posisi markas besar Sekretariat Jenderal OKI berada di Jeddah, Arab Saudi, yang berfungsi untuk mengorganisir berbagai pertemuan dan kegiatan OKI. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat dijadikan hak istimewa bagi Arab Saudi untuk mengarahkan berbagai kegiatan dan pertemuan negara-negara anggota OKI secara bilateral maupun multilateral.

Pendanaan Arab Saudi untuk OKI

Pendanaan merupakan sebuah penunjang penting dari pengaruh dan jangkauan Arab Saudi, yang mencakup negara-negara yang secara ekonomi lemah rentan terhadap pengaruh Arab Saudi. Sebagai hasil dari pendanaannya untuk institusi di seluruh dunia Muslim, Arab Saudi telah berhasil mendapatkan kepemimpinan dari beberapa institusi tersebut. Peran kepemimpinan yang dilembagakan oleh Arab Saudi dalam perannya sebagai pemodal organisasi Islam tersebut, memastikan bahwa Arab Saudi menjalankan suara terkemuka di dunia Muslim. Pengaruh *soft power* nya ini sangat berharga dalam menciptakan pandangan dunia di negara-negara anggota yang kurang berkembang melalui promosi Islam versi *Sunni*, dengan penyebaran interpretasi paham tersebut beserta nilai-nilainya. Arab Saudi yang merupakan rumah bagi Sekretariat OKI dan beberapa organ-organ pendukung OKI, termasuk *Islamic Development Bank* (IDB), pada tahun 2006, Pemerintah Arab Saudi mendukung visi IDB dengan menyediakan US\$1 miliar untuk program pengentasan kemiskinan (IsDB, 2006). Hingga tahun 2019, total pendanaan dari Arab Saudi kepada IDB sekitar US \$173,5 juta (*King Salman Humanitarian Aird and Relief Centre, 2019*). Kedua, Arab Saudi merupakan tuan rumah bagi *Islamic Solidarity Fund* (ISF), yang didirikan sebagai organ pendukung OKI pada tahun 1974. Pada pertemuan tersebut Arab Saudi memberikan bantuan dana sebesar \$9 juta kepada ISF, yang ditujukan untuk memberikan bantuan materi, sosial, dan budaya kepada komunitas Muslim di seluruh dunia (Arab News, 2019).

OKI juga dalam beberapa kesempatan terus menunjukkan apresiasinya kepada Arab Saudi berkaitan dengan sumbangan Arab Saudi kepada negara-negara anggota OKI. Seperti pada KTT 27 September 2017 di New York, OKI menyampaikan apresiasi atas dukungan negara anggota khususnya Arab Saudi yang memberikan bantuan sebesar US \$10 miliar (Arab News, 2019). Kemudian pada tahun 2018, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memberikan penghormatan kepada Aliansi Arab atas sumbangannya sebesar US \$1,5 miliar untuk mendukung otoritas yang sah di Yaman (Saudi Press Agency, 2018). Pada tahun 2019, Arab Saudi menyumbangkan dana sebesar US \$500 juta kepada *Yemen Humanitarian Response Plan* (YHRP) (Reliefweb, 2019). Lalu pada tahun ini Arab Saudi, yang memimpin koalisi militer yang memerangi Houthi,

menyumbangkan bantuan sebesar US \$430 juta (DW, 2021). Jumlah bantuan yang diberikan Arab Saudi untuk Yaman selama enam tahun terakhir diperkirakan berjumlah US \$17,3 miliar. Selain Yaman, Arab Saudi juga telah menjadi salah satu sumber pendanaan terbesar, baik melalui jalur formal maupun informal ke negara-negara mayoritas Muslim *Sunni*, misalnya Mesir, Bangladesh, Malaysia, dan Pakistan yang juga merupakan anggota dari OKI. Terhitung hingga September 2019, Arab Saudi telah menyalurkan US \$37,66 miliar untuk 118 negara penerima (King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, 2019).

Pemblokiran Iran dari KTT OKI

Arab Saudi juga telah menggunakan konsep *hard diplomacy* dengan menggunakan cara-cara seperti ancaman, dan tekanan politik untuk memastikan kepatuhan. Raja Salman menggunakan *platform* OKI untuk mengecam Iran, dengan memperingatkan bahwa serangan teroris di Kawasan Teluk dapat membahayakan pasokan energi global. Rencana Arab Saudi untuk mengisolasi dan menahan Iran telah mencapai puncak baru. Sejak tahun 2016, pada saat ketegangan antara Arab Saudi dan Iran meningkat, atas permintaan dari negara Teluk yang menginginkan untuk mengeluarkan Iran dari OKI (CNN Indonesia, 2016). Hal tersebut didasarkan pada sikap Iran yang dianggap telah merusak persatuan dan solidaritas Islam dengan mendukung terorisme secara terus-menerus. Lebih lanjut pada tahun 2018, perwakilan dari Republik Islam Iran tidak dapat menghadiri pertemuan anggota tetap Organisasi untuk Kerja sama Islam (OKI) karena Arab Saudi menolak memberikan visa kepada negara tersebut. Pertemuan tersebut didasarkan atas perintah dari Arab Saudi untuk membahas agresi milisi Houthi (Organization of Islamic Cooperation, 2018). Karena Iran dianggap telah membantu kelompok militan *Syiah* Houthi yang secara terus-menerus menembakkan rudal ke wilayah Arab Saudi. Selanjutnya pada Februari 2020, Arab Saudi melakukan tekanan kembali untuk Iran dengan kembali memblokir kehadiran delegasi Iran dalam pertemuan OKI di Jeddah (Reuters, 2020).

Dampak Diplomasi Arab Saudi melalui OKI terhadap Kontestasi Hegemoni Ideologi vis-à-vis Iran

Dalam persaingannya melawan ideologi Sunni dari Arab Saudi, Iran berusaha dengan berbagai cara untuk melemahkan OKI yang menjadi instrumen bagi Arab Saudi untuk menyebarluaskan pengaruh dominannya. Beberapa cara yang dilakukan oleh Iran diantaranya, melalui *Muslim Summit* atau *Kuala Lumpur Summit 2019*, *The Amman Messages*, dan internasionalisasi haji. Dalam mengatasi masalah-masalah dunia Muslim, maka akan mengacu pada tiga masalah, yaitu isu Palestina, campur tangan negara-negara besar dalam urusan domestik Muslim, dan kebutuhan akan kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi sebagai isu-isu penting dunia Muslim. Presiden Hassan Rouhani menggarisbawahi bahwa Palestina adalah salah satu isu terpenting bagi dunia Islam yang perlu ditanggapi dengan serius di KTT Kuala Lumpur, dan mengatakan bahwa tidak mungkin menyelesaikan masalah dunia Muslim tanpa solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara Muslim (Republika, 2019). Namun di sisi lain, KTT ini dinilai akan menjadi alternatif dari Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang bermarkas di Jeddah, yang berada di bawah kepemimpinan de facto Arab Saudi.

Melalui Risalah Amman ini, dapat dilihat sebagai peluang lain dari negara-negara yang menganut paham *Syiah*, khususnya Iran dalam memperlemah usaha-usaha yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam OKI. Karena pada intinya, Risalah Amman ini merupakan *bargaining power* dari Iran yang ingin menunjukkan bahwa jaringan ulama dalam OKI seharusnya tidak didominasi ulama *Sunni*. Kemudian mengenai tata kelola haji, pada dasarnya pelaksanaan teknis ibadah haji dilaksanakan atas kebijakan dari Arab Saudi, aturan-aturan haji dibahas melalui OKI sebagai *stakeholder* melalui ikatan jaringan ulama yang secara rutin setiap tahunnya mengadakan pertemuan. Iran dan Irak membentuk sebuah gagasan mengenai internasionalisasi haji yang merupakan sebuah pemikiran bahwa penyelenggaraan haji tidak dapat dimonopoli oleh Pemerintah Arab Saudi, namun harus melibatkan seluruh negara pemilik kepentingan yang terlibat di dalam pengiriman peziarah dan penyelenggaraan haji (Riyanto, 2015).

Berdasarkan 2 syarat utama untuk tercapainya *balance of power* di suatu kawasan, dapat dilihat dari sistem internasional yang tetap anarki, terlihat dalam pembahasan bahwa terjadinya kontestasi antara Arab Saudi dan Iran, yang bersaing atas hegemoni ideologi terus berlangsung hingga saat ini. Kemudian terlihat dari pola interaksi di Kawasan Timur Tengah yang merupakan *bipolar* yakni sesuai teori *balance of power* dimana ada dua negara berkekuatan besar yang bertindak untuk memelihara sistem. Syarat kedua yaitu dengan memperkuat sistem internal dan eksternal dengan sistem aliansi. Arab Saudi dan Iran, memiliki sekutu yang ditujukan untuk penggabungan kekuatan. Maka *balance of power* di Kawasan Timur Tengah telah tercapai. Kemudian dalam melihat kontestasi yang terjadi antara kedua negara, Arab Saudi telah memenangkan kontestasi tersebut. Terlihat pada komunike akhir yang dikeluarkan 15 April 2016 juga menyatakan bahwa Iran telah melakukan dukungan berkelanjutan untuk kelompok radikal dan terorisme. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran atas hak-hak OKI. Presiden Hassan Rouhani memutuskan untuk meninggalkan sesi penutupan dari pertemuan tersebut yang dilaporkan sebagai protes (The Iran Primer, 2016). Hal tersebut menandakan bahwa Arab Saudi berhasil menggunakan OKI sebagai media untuk memenangkan persaingan dengan Iran.

Kesimpulan

Peristiwa eksekusi mati oleh pihak Arab Saudi yang dijatuhkan kepada ulama *Syiah* yang bernama Syekh Nimr Al Nimr, merupakan puncak dari konfrontasi antara Arab Saudi dan Iran. Hal tersebut memberikan dampak terputusnya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut, serta menimbulkan konflik-konflik baru yang dilatarbelakangi oleh peristiwa eksekusi mati tersebut. Iran dan Arab Saudi terlibat dalam upaya untuk menghasilkan dan mempromosikan retorika tertentu yang membahas masalah politik dan ideologis mereka. Lalu kontestasi yang berlangsung antara Arab Saudi dan Iran dapat dilihat dari perbedaan kebijakan luar negeri setiap negara dan juga keterlibatan dalam isu Israel-Palestina. Arab Saudi tetap dalam pendiriannya bertujuan untuk mempertahankan *status quo*, yaitu mempertahankan kepemimpinan dan ideologinya pada dunia Muslim. Hal tersebut menciptakan aksi-reaksi dari Iran yang membuat persaingan hegemoni antara kedua negara tersebut. Iran yang bertindak meningkatkan pembelian rudal balistik, dan perencanaan kehadiran militer di Arab Saudi, membuat Arab Saudi menilai Iran sebagai sebuah ancaman yang sangat mengkhawatirkan. Arab Saudi berusaha membangun aliansi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Muslim. Pada akhirnya, ketertundukan sekutu Arab Saudi lebih unggul dibandingkan dengan ketertundukan sekutu Iran. Hal tersebut menunjukkan bahwa tipe pola interaksi yang terjadi di Kawasan Timur Tengah cenderung menunjukkan bipolarisasi, yang dapat juga

dilihat dalam konflik Suriah dan kehadiran Garda Quds sehingga pola tersebut semakin membuat regionalisme di Kawasan Timur Tengah menjadi sulit terealisasi.

Dampak dari persaingan Arab Saudi dan Iran, mencakup tiga aspek yang menyebabkan ketidakstabilan kawasan ini, yaitu ekonomi, politik, dan keamanan. Arab Saudi menggunakan OKI sebagai perwujudan dari *balance of power* untuk memenangkan persaingan ideologi dengan Iran. Arab Saudi menunjukkan perilaku hegemoniknya, dengan memberikan keuntungan bagi OKI untuk memperkuat OKI. Tujuan Arab Saudi memilih untuk menggunakan OKI sebagai sarana diplomasinya, karena untuk melawan tantangan dominasi umat *Syiah* di dunia Muslim. Terdapat beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi untuk mempengaruhi negara anggota OKI. Selain itu, kendali atas organisasi dan penerapan pengaruh hegemoni yang signifikan oleh Arab Saudi, berasal dari adanya dominasi terhadap susunan struktural OKI dan ketergantungannya pada pendanaan dari Arab Saudi. Di sisi lain, untuk mendukung metode *soft diplomacy* yang telah dilakukan tersebut, Arab Saudi juga melakukan tekanan terhadap Iran dengan melakukan pemblokiran kedatangan dan penangguhan pemberian visa pada beberapa pertemuan OKI. Perlawanan Iran untuk melemahkan OKI, ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam *Kuala Lumpur Summit 2019*. Langkah lain yang menjadi *bargaining power* Iran adalah adanya *The Amman Message* dan juga internasionalisasi haji.

Pada akhirnya, kontestasi hegemoni ideologi tersebut dimenangkan oleh Arab Saudi yang menggunakan berbagai upaya untuk mempertahankan *status quo* dan memperluas pengaruh Islam *Sunni* di dunia Muslim, melalui OKI. Di bawah pengaruh Arab Saudi, tidak mengherankan kepentingan nasional Arab Saudi telah diadopsi oleh OKI. Penilaian Saudi terhadap Iran sebagai ancaman bagi Amerika Serikat kini telah bergeser dengan menghadirkan Iran sebagai ancaman utama bagi Timur Tengah dan dunia Muslim. Untuk tujuan ini, Arab Saudi telah menemukan forum yang ideal di OKI. Iran tidak dapat menandingi sumber daya keuangan yang signifikan yang telah dicurahkan oleh Arab Saudi untuk OKI. Dengan demikian, Arab Saudi telah memperoleh pengaruh yang tak tertandingi atas organisasi ini. Sejatinya, diplomasi yang dilakukan oleh Arab Saudi ini secara tidak langsung merusak kredibilitas organisasi sebagai pihak netral dan merusak gagasan persatuan Muslim.

Referensi

- AA. (2011, 28 Juni). "OIC Changes Name as Organization of Islamic Cooperation." <https://www.aa.com.tr/en/archive/oic-changes-name-as-organization-of-islamic-cooperation/417866> diakses pada 28 Juli 2021
- Akbarzadeh, Shahram & Zahid Shahab Ahmed. (2017). *Impacts of Saudi Hegemony on the Organization of Islamic Cooperation (OIC)*. Australia: Springer Science+Business Media. LCC.
- Akbarzadeh, Shahram & Zahid Shahab Ahmed. (2019). *Sectarianism and Organisation of Islamic Cooperation (OIC)*. Regional Studies Assistance.
- Al Arabiya*. (2018, 3 April). "Mohammed bin Salman: The Triangle of Evil Iran, the Brotherhood, and Terrorist Groups." <https://bit.ly/3uCUiqk> diakses pada 27 Mei 2021
- Al Ghafli, Ali. (2017). "The Islamic Military Alliance to Fight Terrorisme: Structure, Mission, Politics." *Journal of Regional Security* 12(2): 157-185. https://www.researchgate.net/publication/325040296_The_Islamic_Military_Alliance_to_Fight_Terrorism_Structure_Mission_and_Politics diakses pada 29 April 2021.

- Aljazeera.* (2017, 20 Mei). "Trump Arrives in Saudi Arabia in First Foreign Trip." <https://www.aljazeera.com/news/2017/5/20/trump-arrives-in-saudi-arabia-in-first-foreign-trip> diakses pada 22 April 2021
- Aljazeera.* (2019a, 14 Mei). "Saudi Arabia Says Oil Stations Attacked by Armed Drones." <https://www.aljazeera.com/news/2019/5/14/saudi-arabia-says-oil-stations-attacked-by-armed-drones> diakses pada 24 April 2021
- Aljazeera.* (2019b, 14 September). "Houthi Drone Attacks on 2 Saudi Aramco Oil Facilities Spark Fires." <https://www.aljazeera.com/economy/2019/9/14/houthi-drone-attacks-on-2-saudi-aramco-oil-facilities-spark-fires> diakses pada 26 April 2021
- Arab News.* (2016, 12 September), "OIC Chief Commends Hajj Efforts," <https://www.arabnews.com/node/983541/saudi-arabia> diakses pada 30 Juni 2021
- Arab News.* (2019, 12 Juli). "Organization of Islamic Cooperation Provides Financial Assistance to Member States." <https://www.arabnews.com/node/1524481/saudi-arabia> diakses pada 29 Mei 2021
- BBC News Indonesia.* (2017, 9 Juni). "Tujuh Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik: Ada Apa Dengan Qatar?." <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40157225> diakses pada 24 April 2021
- CNN Indonesia.* (2016, 22 November). "Negara Teluk Didesak Keluarkan Iran dari OKI." <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161121205542-120174250/negara-teluk-didesak-keluarkan-iran-dari-oki> diakses pada 30 Mei 2021
- CNN Indonesia.* (2016a, 5 Januari). "Sejarah Panjang Perselisihan Arab Saudi dan Iran." <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105133321-120102293/sejarah-panjang-perselisihan-arab-saudi-dan-iran> diakses pada 20 Desember 2019
- Courthouse News.* (2020, 30 Januari). "US Boosts Military Presence at Saudi Air Base." <https://www.courthousenews.com/us-boosts-military-presence-at-saudi-air-base/> diakses pada 26 April 2021
- DW.* (2017, 26 November). "Saudi Led Islamic Military Alliance Counter Terrorism or Counter Iran?." <https://www.dw.com/en/saudi-led-islamic-military-alliance-counterterrorism-or-counter-iran/a-41538781> diakses pada 29 April 2021
- DW.* (2021, 3 Januari). "Yemen: UN Donor Conference Raises a 'Disappointing' \$1.7 Billion." <https://www.dw.com/en/yemen-un-donor-conference-raises-a-disappointing-17-billion/a-56738853> diakses pada 29 Mei 2021
- Ejaz, Atif. (2018). "The Saudi-Iranian Rivalry and its Regional Effects." https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/61358/18Dec_Ejaz_Atif.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses pada 13 Mei 2021.
- France 24.* (2019, 20 September). "Pompeo Says US Building Anti-Iran Coalitions After Saudi Oil Attack." <https://www.france24.com/en/20190920-usa-mike-pompeo-anti-iran-coalition-saudi-oil-attack-houthi-yemen> diakses pada 29 April 2021
- ICDS.* (2020, 13 November). "New Peace Treaties in the Middle East." <https://icds.ee/en/new-peace-treaties-in-the-middle-east/> diakses pada 28 Juli 2021
- IMCTC.* (2020, 9 Januari). "Secretary-General of Organization of Islamic Cooperation Delivers a Presentation at the Headquarters of Islamic Military Counter Terrorism Coalition." <https://www.imctc.org/en/MediaCenter/Events/Pages/Event09012020.aspx> diakses pada 30 April 2021
- Investopedia.* (2020). "Who are Iran's Biggest Allies and Why?." <https://www.investopedia.com/articles/investing/082115/who-are-irans-biggest-allies-and-why.asp> diakses pada 22 Mei 2021

- IsDB*. (2006, 7 November). "Habibie Outlines Concrete Steps to Realizing IDB's Vision 1440H (2020) at IDB Governors Reception." <https://www.isdb.org/news/habibie-outlines-concrete-steps-to-realizing-idbs-vision-1440h-2020-at-idb-governors-reception> diakses pada 28 Mei 2021
- Kadir, Abd. (2015). "Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran." *Jurnal Politik Profetik* 5(1): 1-15.
- King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre. 2019. *Saudi Arabia Platform*. http://www.arabia-saudita.it/files/news/2019/10/data_ksrelief_e_update_september_2019.pdf diakses pada 28 Mei 2021
- Luis, Victor. (2014). "The Organization of Islamic Cooperation in Contemporary International Society." https://www.researchgate.net/publication/306092229_The_Organization_of_Islamic_Cooperation_in_contemporary_international_society diakses pada 28 Juli 2021.
- Mackenzie, Tyler & Anthony M Boone. (Ed.). (2012). *Rivalry in The Middle East : Saudi Arabia and Iran*. New York: Nova Sciecnce Publisher.
- Martin, Susan B. (2003). *From Balance of Power to Balancing Behavior: The Long and Winding Road*. dlm. Andrew K. Hanami. *Perspective on Structural Realism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mearsheimer, John J. (1995). "The False Promise of International Institutions." *International Security* 19(3): 5-49.
- Mearsheimer, John J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Company. Inc.
- Middle East Forum*. (2010). "Russian and Chinese Support for Tehran Iranian Reform and Stagnation." <https://www.meforum.org/2690/russian-chinese-support-for-iran> diakses pada 22 Mei 2021
- Nye, Joshep. (2008). *Public Diplomacy and Soft Power*. The Annals of The American Academy.
- OIC Istanbul Summit. 2016. *Final Communique of The 13th Islamic Summit Conference (Unity and Solidarity for Justice and Peace)*. <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=14&refID=5> diakses pada 23 Desember 2019
- Organization of Islamic Cooperation*. (2018a, 8 agustus). "Final Communique of the Meeting of Permanent Representatives on Houthi Militias' Aggression on Two Saudi Oil Tankers and Their Targeting of Maritime Navigation and International Trade in Bab Al-Mandab Strait in the Red Sea." https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=19898&t_ref=11428&lan=en diakses pada 30 Mei 2021
- Organization of Islamic Cooperation*. 1970a. *General Secretariat*. https://www.oic-oci.org/page/?p_id=38&p_ref=14&lan=en diakses pada 28 Mei 2021
- Organization of Islamic Cooperation*. 2012. *Resolutions Adopted by the Fourth Extraordinary Islamic Summit Conference*. <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=26&refID=8> diakses pada 23 Mei 2021
- Organization of Islamic Cooperation*. 2018b. *Report of The Meeting of the Contact Group on the Situation in Yemen*. <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=3343&refID=1167> diakses pada 27 Mei 2021
- Phoenna, Rizky Poetra. (2016). "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani." *Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan* 20(1):1-16
- Prayuda, Rendi & Rio Sundari. (2019). "Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analitis." *Journal of Diplomacy and International Studies*: 80-93. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/4429/2184> diakses pada 12 April 2020. hal. 86

- Putra, Rizky Pratama. (2019). "Intervensi Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah." *Jurnal PIR* 4(1): 76-99 . <http://ejournal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/PIR/article/view/605/827> diakses pada 27 April 2020
- Raju, Sugunakara. (Ed.). (2012). *International Politics : Concepts. Theories. And Issues*. New Dehli: SAGE Publications India Pvt Ltd.
- Reliefweb*. (2019, 26 Febuari). "Saudi Arabia Donates an Additional USD \$500 Million to Yemen Humanitarian Response Plan." <https://reliefweb.int/report/yemen/saudi-arabia-donates-additional-usd-500-million-yemen-humanitarian-response-plan> diakses pada 29 Mei 2021
- Republika*. (2019, 19 Desember). "Iran Usung Masalah Palestina dalam KL Summit." <https://www.republika.co.id/berita/q2r6ws382/iran-usung-masalah-palestina-dalam-kl-summit> diakses pada 29 Juli 2021
- Reuters*. (2017a, 8 Mei). "Iran Minister Warns Saudi Arabia After 'Battle' Comments: Tasnim." <https://www.reuters.com/article/topNews/idCAKBN1830Y7OCATP?edition-redirect=ca> diakses pada 7 April 2021
- Reuters*. (2017b, 13 Mei). "U.S Nears \$100 Billion Arms Deal For Saudi Arabia: White House Official." <https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-saudi/idUSKBN18832N> diakses pada 22 April 2021
- Reuters*. (2019, 12 Juni). "Yemen's Houthi Strike Saudi Airport. Coalition Vows Retaliate." <https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi-airport-idUSKCN1TD0WS> diakses pada 24 April 2021
- Reuters*. (2020, 3 Febuari). "Saudi Arabia Blocks Iran from Islamic Grouping's Meeting: Tehran." <https://www.reuters.com/article/us-iran-saudi-oic-meeting-idUSKBN1ZW0OP> diakses pada 30 Mei 2021
- RFERL*. (2017, 19 November). "Arab League Foreign Ministers Condemn Iran 'Agression'." <https://www.rferl.org/a/arab-league-iran-violation-hariri/28862644.html> diakses pada 29 April 2021
- Riyanto, Agus. (2015). Internasionalisasi Terbatas Tata Kelola Haji. <https://business-law.binus.ac.id/2015/10/06/internasionalisasi-terbatas-tata-kelola-haji/#:~:text=Internasionalisasi%20haji%20adalah%20sebuah%20pemikiran,pe ngiriman%20haji%20dan%20penyelenggaraan%20haji> diakses pada 30 Juli 2021
- Saham OK*. (2020, 18 Febuari). "Grafik Harga Minyak Mentah." <https://www.sahamok.net/grafik-harga-komoditi/minyak-mentah/> diakses pada 15 Mei 2021
- Security Council Report. (2020). *April 2020 Monthly Forecast: Yemen*. <https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2020-04/yemen-17.php> diakses pada 16 Mei 2021
- Sindo News*. (2016, 7 September). "Perang Mulut Soal Haji, Mufti Saudi: Pemimpin Iran Bukan Muslim." <https://international.sindonews.com/berita/1137308/43/perang-mulut-soal-Haji-mufti-saudi-pemimpin-iran-bukan-muslim> diakses pada 30 Juni 2021
- Siswati, Endah. (2017). "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci." *Jurnal Translitera* Edisi 5: 11-33. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/355/345> diakses pada 8 April 2021.
- Soderbaum, Fredrik. (2011). "Regionalism." https://www.researchgate.net/publication/260228052_Regionalism diakses pada 28 Juli 2021.
- The Atlantic*. (2021, 16 Mei). "No One Is Coming to Help the Palestinians." <https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/05/israel-palestine-iran-saudi-arabia/618904/> diakses pada 28 Juli 2021

- The Daily Star*. (2016, 6 September). "Top Saudi Cleric Says Iranians are 'Not Muslim'." <https://www.thedailystar.net/world/top-saudi-cleric-says-iranians-are-not-muslims-1281643> diakses pada 30 Juni 2021
- The Dhaka Declaration. 2018. *45th Session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation (Session of Islamic Values for sustainable Peace, Solidarity, and Development)*. <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=1907&refID=1078> diakses pada 27 Mei 2021
- The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia. 2017. *Statements: Remarks by Foreign Minister Adel bin Ahmed Al-Jubeir at the Munich Security Conference*. <https://www.saudiembassy.net/statements/remarks-foreign-minister-adel-bin-ahmed-al-jubeir-munich-security-conference> diakses pada 27 Mei 2021
- The Iran Primer*. (2016. 15 April). "Iran and Islamic Conference: Tensions at the Summit." <https://iranprimer.usip.org/blog/2016/may/23/iran-and-islamic-conference-tensions-summit> diakses pada 30 Juli 2021
- Tribune*. (2016, 11 Maret). "Saudis to Give Pakistan \$122M in Aid." <https://tribune.com.pk/story/1063733/saudis-to-give-pakistan-122m-in-aid> diakses pada 30 Juni 2021
- VOA*. (2021, 8 Maret). "Houthi Yaman Tembakkan Rudal. Drone ke Fasilitas Minyak Saudi." <https://www.voaindonesia.com/a/houthi-yaman-tembakkan-rudaldrone-ke-fasilitas-minyak-saudi-/5805665.html> diakses pada 26 April 2021
- Walt, Stephen M. 1985. "Alliance Formation and The Balance of World Power". *Jurnal International Security* 9(4): 3-43.
- Wastnidge, Edward. (2016). "Diplomacy and Reform in Iran: Foreign Policy Under Khatami." <https://bit.ly/2WvzwNS> diakses pada 28 Juli 2021.
- White, Brian. (2001). *Diplomacy*. https://www.academia.edu/25494168/Diplomacy_brian_white